



Segera Selesaikan Soal Aset Daerah

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2013 pada Mei ini. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah segera membenahi data pendukung dan tindak lanjut temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.

"Salah satu penilaian atas opini BPK adalah aktivitas atau kemajuan satuan kerja dalam menindaklanjuti temuan tahun sebelumnya,"

• ke halaman 15 kolom 1

Aset dan barang daerah

Permasalahan tanah UPPLA 1 di Sedau

Tanah perkebunan di Sejangkung, Singkawang

Rumah dinas DPRD Jalan Karvin Pontianak

Tanah Dinas Kesehatan di Jalan Kartini Pontianak



Kendaraan dinas dan peralatan rumah dinas yang dikuasai mantan pimpinan dewan

Permasalahan kendaraan dinas pada Biro Umum yang dibawa mantan anggota DPRD

GRAFIS : SIGIT /PONTIANAKPOST



Segera Selesaikan Soal Aset Daerah

Sambungan dari halaman 9

ujar Christiandy dalam rapat koordinasi pengelolaan barang milik daerah terkait pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Beberapa temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya yakni permasalahan tanah UPPLA I di Sedau, tanah perkebunan di Sejangkung, Singkawang, tanah Dinas Kesehatan di Jalan Kartini Pontianak, rumah dinas DPRD Jalan Karvin Pontianak, kendaraan dinas dan peralatan rumah dinas yang dikuasai mantan pimpinan dewan, serta permasalahan kendaraan dinas pada Biro Umum yang dibawa mantan

anggota DPRD. Ia meminta permasalahan tersebut tidak didiamkan atau dibiarkan saja, walaupun sudah di-surat dan diingatkan sekda maupun BPKAD.

"Terhadap permasalahan permasalahan tersebut, tim BPK akan menilai sejauh mana pimpinan SKPD bersangkutan selaku pengelola aset bertanggungjawab menindaklanjutinya," ungkap Christiandy.

Ia juga mengungkapkan saat ini banyak SKPD yang belum menyampaikan sertifikat dan BPKB asli untuk ditatausahakan BPKAD sesuai ketentuan berlaku. Beberapa SKPD yang belum menyampaikan diantaranya Dishubkominfo, Dispenda, dan Unit Proteksi Tanaman Pangan.

"Penyimpanan BPKB oleh BPKAD selaku pembantu pengelola merupakan kebijakan Pemprov Kalbar," katanya.

Menurut Christiandy, saat ini juga masih banyak SKPD yang belum menyertifikasikan aset tanahnya atas nama Pemprov Kalbar maupun melakukan pengamanan fisik secara memadai. Hal ini terjadi karena pimpinan satuan kerja maupun pejabat pada satuan kerja tersebut kurang memahami petunjuk yang ada, yakni Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

"Satker tidak mau berkon-sultasi dengan BPKAD. Saya berharap ketledoran seperti ini tidak terjadi lagi, termasuk pada pencatatan dan pelaporan aset pada tahun anggaran 2014 maupun tahun selanjut-

nya," ungkap Christiandy.

Terkait aspek penghapusan barang-barang rusak maupun rusak berat, ia meminta pengurus barang segera membuat laporan dan usulan penghapusan kepada pimpinan satuan kerja.

"Selanjutnya usulan penghapusan disampaikan kepada sekda melalui BPKAD untuk diproses lebih lanjut," katanya.

Christiandy menuturkan dengan banyaknya persoalan aset, diperlukan komitmen dan keseriusan pihak terkait untuk mengelola dan menyelesaikannya. "Tugas pengelola aset bukan hal mudah. Tetapi dengan kesungguhan, kedepannya aset Pemprov Kalbar dapat dikelola dengan tertib, transparan, dan akuntabel," ujarnya. **(uni)**